



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420 / 9249 /2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SURAKARTA

KEPADА :  
YAYASAN MANDALA BHAKTI SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;  
b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah kejuruan pada Yayasan Mandala Bhakti Surakarta telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Mandala Bhakti Surakarta Nomor : 143/SMK-MABHA/VI/2016, tanggal 9 Juni 2016, Perihal Permohonan Verifikasi Ulang Ijin Pendirian SMK Mandala Bhakti;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Nomor : 421/2474/Dikmen/2016, tanggal 6 Juni 2016, Perihal Permohonan Verifikasi Ulang Pendirian SMK;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/06256, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Rekomendasi.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Mandala Bhakti Pengelola Surakarta
- b. Nama Sekolah : SMK MANDALA BHAKTI
- c. Alamat : Jl. Letjend. Soeprapto No. 16, Sumber, Banjarsari, Surakarta

KEDUA : Penyelenggaraan SMK MANDALA BHAKTI sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA : Diwajibkan kepada Yayasan Mandala Bhakti Surakarta untuk menindaklanjuti perizinan-perizinan terkait dengan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 September 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
7. Yayasan Mandala Bhakti Surakarta;
8. Arsip.